



# Sekolah Rakyat Terlalu Terburu-buru

## ■ DPRD DIY: SDM dan Koordinasi Belum Matang

**YOGYA, TRIBUN** - Kalangan legislatif mengkritik pelaksanaan program Sekolah Rakyat berbasis asrama di DIY. Program pemerintah pusat ini dinilai terlalu terburu-buru, sehingga muncul reaksi dari sejumlah masyarakat, di antaranya pengunduran diri 29 murid.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, RB Dwi Wahyu, mengatakan pendidikan alternatif yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dinilai berjalan terlalu tergesa-gesa. "SDM (sumber daya manusia, *red*), kurikulum, hingga koordinasi antarinstansi. Penyelenggaraan sekolah rakyat ini menurut saya terlalu terburu-buru. Ini instruksi dari pusat, iya, tapi di daerah belum disiapkan secara matang, SDM-nya saja belum beres," katanya, saat diwawancara, Rabu (16/7).

Menurut Dwi, hingga kini, koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di DIY belum berjalan optimal. Di sisi lain penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dinas Sosial memegang data warga miskin dan kebutuhan dasar. Dinas Pendidikan bertanggung jawab pada aspek kurikulum dan pengajar.

### ADA PERSIAPAN

- Kalangan legislatif mengkritik pelaksanaan program Sekolah Rakyat berbasis asrama di DIY terlalu terburu-buru.
- Ada persiapan yang belum matang dalam sisi sumber daya manusia, kurikulum, hingga koordinasi antarinstansi.
- Selain itu, penyebaran Sekolah Rakyat dinilai belum berbasis data kemiskinan.

Sedangkan, Dinas PU terkait dengan infrastruktur sekolah.

"Sekarang ini masih belum jelas siapa mengerjakan apa. Bahkan, juknis (petunjuk teknis, *red*) dan juklak (petunjuk pelaksanaan, *red*) belum final. Jumlah sekolah rakyat yang berdiri pun baru dua, itu pun belum terdistribusi secara merata," ungkapnya.

Selain itu, penyebaran Sekolah Rakyat belum berbasis data kemiskinan. Dia mencontohkan, salah satunya Sekolah Rakyat yang dibuka di Bantul. Padahal, wilayah seperti Gunungkidul atau Kulon Progo memiliki tingkat

kemiskinan yang lebih tinggi. "Kalau memang ini basisnya kemiskinan, seharusnya Sekolah Rakyat hadir di daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrem. Jangan hanya di satu titik. Ini kan menandakan perencanaannya belum berbasis data yang komprehensif," ungkap Dwi.

Dia mengingatkan agar semangat intervensi sosial ini tidak mengabaikan prinsip pendidikan yang berkualitas. Polttisi PDIP ini menilai, proses rekrutmen tenaga pendidik untuk sekolah rakyat masih belum dilakukan dengan standar yang memadai. Tak hanya soal jumlah guru, kesiapan dalam mengelola model pendidikan alternatif berorientasi pembentukan karakter juga belum optimal. Termasuk, wacana pendekatan militer dalam Sekolah Rakyat yang dinilai tidak bisa semata-mata membentuk karakter siswa.

### Kajian

Menurut Dwi penyelenggaraan sekolah rakyat harus diawali dengan kajian yang komprehensif. Mulai dari pemetaan kebutuhan di tiap kabupaten/kota, identifikasi jumlah anak tidak sekolah, hingga rencana kurikulum dan sistem pengajarannya.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengeksekusi instruksi pusat, tetapi juga mampu mengkritisi dan menyesuaikan dengan konteks lokal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, termasuk tokoh pendidikan, budaya, dan orang tua siswa harus dilakukan.

Kepala Dinas Sosial (dinasos) DIY, Endang Patmintersih, mengungkapkan hingga pertengahan tahun ini sudah ada dua sekolah rakyat yang resmi dibuka di wilayah DIY, masing-masing berada di Bantul dan Sleman. Saat ini ada 275 siswa di DIY yang mengikuti Sekolah Rakyat. Sebanyak 200 siswa di Sekolah Rakyat di Bantul, sisanya 75 siswa bersekolah di Sekolah Rakyat di Sleman.

"Para siswa tidak hanya memperoleh akses pendidikan formal gratis, tapi juga fasilitas lengkap mulai dari laptop, seragam, hingga kebutuhan pribadi sehari-hari. Makan tiga kali sehari, ada *snack*, sepatu, tas ransel, semua kami siapkan." pungkasnya. (*hda*)



## Bangun 100 Titik

**SEBANYAK** 100 titik Sekolah Rakyat berstatus permanen bakal dibangun di berbagai daerah mulai September 2025 mendatang. Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, berujar, bangunan anyar tersebut disiapkan sebagai pengganti Sekolah Rakyat yang masih memanfaatkan gedung-gedung milik instansi pemerintahan.

"Tahun ini akan dibangun 100 titik Sekolah Rakyat. Seperti di sini, sifatnya sementara, tahun depan akan menggunakan gedung permanen," katanya selepas menyambangi Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Rabu (16/7).

Dijelaskan, pada September mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memulai proyek pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen tersebut. Akan tetapi, lahan sekolah yang dikhususkan untuk warga desil satu itu disediakan secara mandiri oleh pemerintah

daerah di level kabupaten/kota atau provinsi.

"Gedungnya dibangun Kementerian PU atas arahan presiden. Total titik 100 yang dari pemerintah. Tapi, nanti ada partisipasi swasta juga. Jadi, jumlahnya (Sekolah Rakyat) bisa lebih dari 100. Tahun ini dibangun, tahun depan insyaallah selesai," imbuh menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan, kegiatan Sekolah Rakyat yang digelar di BBPPKS Regional III Yogyakarta beberapa hari terakhir ini berlangsung relatif lancar. Meski ada beberapa kendala kecil, kepala sekolah dan tenaga kependidikan terbukti mampu mengatasinya, sehingga tidak mempengaruhi antusiasme siswa.

"Kepala sekolah sudah ikut pembekalan, sehingga punya inisiatif jika ada kendala-kendala. Ketika ada masalah, mereka bisa mengantisipasi dan mencari solusi," pungkas Mensos. **(aka)**